

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

Anggaran adalah rencana keuangan yang sistematis untuk jangka waktu tertentu yang mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Menurut Mardiasmo dalam (Nadia & Vina, 2022), anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran adalah alat untuk pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan menunjukkan prioritas kebijakan publik.

Anggaran disusun dalam beberapa tahapan utama, sebagai berikut:

1. Perencanaan, tahap ini menentukan kebutuhan dan prioritas program atau kegiatan berdasarkan tujuan strategis dan kebijakan pemerintah. Tahap ini melibatkan analisis situasi, perkiraan sumber daya, dan estimasi kebutuhan dana.
2. Pengesahan, tahap ini menetapkan anggaran oleh badan legislatif setelah proses pembahasan dan penilaian selesai. Pengesahan anggaran memberikan legitimasi.
3. Pelaksanaan, pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah disahkan. Ini termasuk pengelolaan dana, pengawasan realisasi, dan pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana.
4. Pengawasan, pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran untuk menilai kinerja dan kepatuhan terhadap anggaran. Ini adalah langkah penting untuk menemukan kesalahan dan memperbaikinya jika diperlukan.

2.1.1 Karakteristik Anggaran

Anggaran mencakup komitmen manajemen, yang berarti manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai tujuan anggaran. Terdapat beberapa karakteristik anggaran, antara lain:

- a. Anggaran adalah estimasi dari potensi laba satuan bisnis.

- b. Anggaran ditulis dalam bentuk uang, tetapi dapat dibantu oleh uang non-uang.
- c. Mencakup periode satu tahun.
- d. Anggaran merupakan komitmen manajemen manajer setuju untuk bertanggung jawab atas pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- e. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi daripada pihak yang menganggarkan.
- f. Anggaran hanya dapat diubah sesuai dengan persyaratan setelah disetujui.
- g. Kinerja keuangan secara berkala sebenarnya dibandingkan dengan anggaran, dan perbedaan dihitung dan dijelaskan (Murdayanti & Yunika, 2017).

Dengan mempertimbangkan beberapa atribut di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun, yang dinyatakan baik dalam satuan keuangan maupun satuan non-keuangan.

2.1.2 Prinsip-prinsip Anggaran

Menurut (Nordiawan *et al.*, 2010), terdapat beberapa prinsip anggaran sebagai berikut:

- a. Anggaran transparan dan dapat diandalkan. Anggaran harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari proyek atau kegiatan yang dianggarkan
- b. Disiplin anggaran. Belanja yang dianggarkan pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran
- c. Keadilan anggaran. Sebaliknya, pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang dapat dicapai secara rasional untuk setiap sumber pendapatan. Karena pendapatan pemerintah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan, pemerintah wajib mengalokasikan anggarannya secara adil untuk memberikan pelayanan kepada semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
- d. Efisiensi dan efektivitas anggaran. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.3 Klasifikasi Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran. Anggaran diklasifikasikan secara sistematis dan dijelaskan menurut klasifikasi organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

1. Klasifikasi organisasi mengelompokkan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi K/L, yaitu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Jenis fungsi terdiri dari fungsi dan subfungsi. Fungsi adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dan subfungsi adalah penjelasan lebih lanjut atau lebih detail tentang fungsi tersebut. Subfungsi terdiri dari kumpulan program dan kegiatan.
3. Klasifikasi jenis belanja, juga dikenal sebagai klasifikasi menurut ekonomi, digunakan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban/pelaporan anggaran. Namun, tujuan penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut berbeda. Dalam proses penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L, tujuan penggunaan jenis belanja adalah untuk mengetahui bagaimana alokasi anggaran didistribusikan ke dalam jenis-jenis belanja.

2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan mencapai tujuan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman dan bertanggung jawab.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Diharapkan bahwa pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat akan ditingkatkan melalui pengelolaan keuangan yang efektif. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang jelas dan akuntabel adalah semua bagian dari pengelolaan keuangan yang baik.

2.2.1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Permendagri No. 77 tahun 2020, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD adalah struktur keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah dan pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah bergantung pada APBD dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran mereka. Salah satunya adalah peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003, APBD disusun berdasarkan kebutuhan pemerintah dan kemampuan pendapatan pemerintah daerah. Rencana kerja pemerintah daerah untuk mencapai tujuan nasional. Dengan mengatur banyak uang yang ada di masyarakat, memungkinkan penanaman modal untuk memajukan perusahaan lokal, menguraikan sumber penerimaan dan pengelolaan belanja pemerintah, dan mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal, penyusunan APBD dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian. Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Anggaran belanja dikategorikan menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Anggaran pembiayaan terdiri dari dana yang diterima dan yang digunakan.

2.2.2 Tujuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tujuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara seluruh pemerintahan daerah gubernur daerah. Dengan bekerja sama antar bagian, diyakini bahwa daerah akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memanfaatkan aset dan sumber daya secara optimal

2. Meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat.
3. Memiliki kemampuan untuk memberikan prioritas kepada belanja pemerintah daerah. Dengan menyusun APBD yang disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan ekonomi daerah

2.2.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi berfungsi sebagai dasar dari kekuasaan dalam belanja dan pendapatan dan memerintahkan pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan berfungsi sebagai prinsip dalam perencanaan kegiatan dan memerintahkan manajemen dalam menyusun APBD.
- c. Fungsi kontrol berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa baik tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. untuk membantu menilai apakah tindakan administrator pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, yang berkaitan dengan anggaran, harus memiliki porsi yang tepat. Anggaran dimaksudkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi adalah fungsi penyaluran dalam hal keadilan. Penganggaran, pendapatan, dan pengeluaran harus digunakan untuk semua pihak, bukan hanya untuk satu sektor atau daerah, dan harus mematuhi prinsip keadilan sebagai bagian dari fungsi APBD.
- f. Fungsi stabilisasi adalah mengupayakan kesepadanan ekonomi utama. APBD berfungsi untuk menjaga dan mendorong keseimbangan ekonomi lokal.

2.3 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut (Nordiawan *et al.*, 2010), realisasi adalah proses yang harus dilakukan untuk menjadi kenyataan dan dilaksanakan sehingga dapat memenuhi harapan. Dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian, realisasi anggaran memberikan informasi penting. Realisasi anggaran adalah kumpulan aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya ekonomi, yang dapat diukur dalam satuan rupiah, dan yang dapat disusun secara sistematis berdasarkan kategori tertentu selama periode anggaran tertentu.

Laporan realisasi anggaran (LRA), juga dikenal sebagai laporan operasional keuangan, adalah laporan yang menyajikan ringkasan sumber daya ekonomi yang dikelola, alokasi, dan penggunaan, serta perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari elemen pendapatan dan belanja (Sabrina, 2018). Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan (Fitra, 2019).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah kumpulan informasi dalam bentuk laporan berupa serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola pada satu periode pelaporan anggaran. Informasi tersebut pada suatu nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penyusunan pada laporan keuangan pemerintah daerah (Wakhid *et al.*, 2022). Menurut PP No. 24 Tahun 2005 laporan realisasi anggaran menyajikan rincian tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki, didistribusikan, dan digunakan selama periode pelaporan. Selain itu, laporan realisasi anggaran setidaknya menampilkan pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa pembiayaan anggaran.

2.3.1 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Manfaat informasi realisasi anggaran adalah bahwa mereka menyediakan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari satu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan

dengan anggarannya. Informasi ini berguna bagi para pengguna laporan dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Memberikan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Memberikan informasi tentang realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- c. Laporan realisasi anggaran dapat dipakai dalam memperkirakan potensi ekonomi dalam pembiayaan aktivitas pemerintah pusat ataupun daerah pada periode yang datang.
- d. Laporan realisasi anggaran dapat digunakan sebagai pembanding antara pemasukan dalam penggunaan anggaran sudah sesuai dengan aturan atau belum.

2.4 Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No.17 tahun 2003, belanja merupakan salah satu komponen APBN dan APBD. Definisi belanja adalah suatu kewajiban pemerintah daerah atau pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebaliknya, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah, yang mencakup semua keluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima ulang oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan, dianggap sebagai penambah ekuitas dan termasuk kewajiban daerah selama satu periode anggaran, menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

2.4.1 Jenis-jenis Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan, Jenis Belanja Daerah Keuangan daerah dibagi menjadi dua kategori berdasarkan hubungannya dengan program dan kegiatan belanja.

1. Kategori pertama terdiri dari belanja langsung, yang mencakup pengeluaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan secara langsung, termasuk pengeluaran untuk pegawai, barang dan jasa, dan modal. Belanja langsung dibagi menjadi kelompok berdasarkan jenis biaya, yaitu:

- a. Belanja pegawai: kelompok ini digunakan untuk membayar honorarium atau kompensasi untuk melaksanakan program dan kegiatan, seperti honorarium panitia pengadaan dan biaya administrasi pembelian/pembangunan untuk membeli setiap aset yang dianggarkan pada program.
- b. Belanja barang dan jasa: Belanja barang pakai habis, bahan baku, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah, gedung, parkir, sarana transportasi, alat berat, perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, dan pemulangan pegawai
- c. Belanja modal: Belanja modal digunakan untuk mengeluarkan uang dalam rangka pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat untuk digunakan dalam kegiatan lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Harga aset yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga aset tersebut.

2. Kategori kedua terdiri dari belanja tidak langsung, yang mencakup pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan program kerja pemerintah. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja:

- a) Belanja untuk pegawai, yang mencakup kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b) Belanja bunga, yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang atas pokok utang (*principal outstanding*) yang ada di perjanjian pinjaman.
- c) Subsidi adalah anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara atau lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan harga yang dapat diterima oleh masyarakat. Subsidi diberikan kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan swasta.
- d) Hibah adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hibah ini dapat diberikan secara sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus, dan tidak dibayar kembali kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemda, atau perusahaan negara atau daerah tertentu. yang dilakukan melalui dokumen perjanjian yang dibuat antara pemberi hibah dan penerima hibah dari pemerintah negara lain, pemerintah dan organisasi internasional dengan memberikan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang dihibahkan ke daerah termasuk dalam belanja hibah.
- e) Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan langsung kepada anggota masyarakat, lembaga kemasyarakatan, atau lembaga non-pemerintah, termasuk lembaga pendidikan dan keagamaan.
- f) Belanja Bagi Hasil adalah dana bagi hasil yang dialokasikan untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau kota, desa, atau pemerintah daerah lainnya sesuai dengan perundang-undangan.
- g) Belanja Bantuan Keuangan adalah dana bantuan keuangan yang dialokasikan untuk tujuan umum atau khusus.
- h) Belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diantisipasi sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.5 Analisis Kinerja Anggaran Belanja

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, kinerja didefinisikan sebagai hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dilakukan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dalam jumlah tertentu. Realisasi anggaran adalah alokasi dan penggunaan dana yang dikelola pemerintah (Erlina *et al.*, 2016). Dengan demikian, kinerja realisasi anggaran dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan hasil suatu organisasi yang terkait dengan misi yang harus dicapai. Rasio keuangan dapat digunakan dalam analisis kinerja untuk menentukan seberapa baik kinerja tersebut.

Informasi tentang realisasi dan anggaran diberikan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada lembaga pemerintah. LRA menyajikan data tentang pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan dari suatu lembaga pemerintah daerah, yang dibandingkan dengan anggarannya. Analisis kinerja pelaksanaan anggaran belanja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan adalah cara untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Menurut SAP PP No. 71 Tahun 2010, belanja dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh Rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar selama tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah. Adanya analisis belanja, maka dapat dilihat bagaimana anggaran belanja berjalan dan berapa banyak yang telah digunakan. Kinerja ini menunjukkan seberapa efisien dan efektif belanja yang dilakukan.

Informasi tentang kinerja ini diperlukan pemerintah dan masyarakat untuk menjawab pertanyaan dan membuat koreksi dan perbaikan di masa mendatang. Analisis kinerja belanja sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui seberapa efisien pemerintah daerah menggunakan anggaran mereka, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan tidak tepat sasaran (Amelia, 2022). Menurut (Mahmudi, 2019), berdasarkan informasi yang ditemukan dalam Laporan Realisasi Anggaran, kinerja belanja dapat dianalisis melalui analisis varian belanja dan analisis rasio efisiensi belanja.

2.5.1 Analisis Varian Belanja

Analisis varian adalah metode evaluasi yang digunakan untuk membandingkan anggaran yang direncanakan (*budgeted*) dengan realisasi (*actual*). Analisis varian belanja ini dapat membantu menemukan dan memahami alasan mengapa ada perbedaan antara anggaran dan realisasi (Mahmudi, 2019). Nilai yang terealisasi dan yang dianggarkan berbeda. Analisis ini sangat penting untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran dan kinerja keuangan. Meskipun analisis varians belanja adalah proses yang cukup mudah, itu dapat memberikan informasi yang sangat berharga. Dalam hal pengeluaran, analisis varians membantu manajemen dalam:

1. Menemukan ketidaksesuaian anggaran;
2. Menemukan sumber ketidaksesuaian tersebut.
3. Mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mengelola pengeluaran di masa mendatang.

Tujuan Analisis Varian Belanja:

- a. Menilai sejauh mana anggaran yang disusun telah terealisasi sesuai dengan rencana. Analisis varian dapat menemukan variasi yang signifikan yang perlu diperhatikan.
- b. Identifikasi Penyebab Perbedaan, cari tahu apa yang membuat anggaran dan hasil berbeda, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.
- c. Rekomendasi Perbaikan, untuk penyusunan dan pelaksanaan anggaran di masa depan, dapat dibuat saran berdasarkan hasil analisis varian.

Analisis Varians memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Pengendalian Anggaran, membantu dalam mengawasi pengeluaran dan memastikan perusahaan tetap pada anggaran yang telah ditetapkan;
- b. Pengambilan Keputusan, memberikan informasi yang relevan bagi manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang alokasi sumber daya dan pengeluaran.
- c. Identifikasi Masalah, membantu dalam mengidentifikasi area di mana bisnis menghabiskan lebih banyak uang daripada yang direncanakan.

Tantangan yang terdapat dalam Analisis Varians:

- a. Ketepatan Data, memastikan bahwa data pengeluaran aktual akurat dan sesuai dengan periode yang dianalisis;
- b. Kompleksitas Varians, varians dapat disebabkan oleh banyak faktor yang saling berhubungan, sehingga memerlukan analisis menyeluruh;
- c. Perubahan Eksternal, perubahan yang disebabkan oleh hal-hal eksternal seperti perubahan dalam harga pasar dan perubahan dalam undang-undang dapat mempengaruhi varians.

Dengan memahami dan menerapkan analisis varians belanja, perusahaan dapat meningkatkan pengelolaan anggaran mereka, mengidentifikasi masalah lebih awal, dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kesehatan finansial.

Rumus analisis varians (selisih) belanja yaitu:

$$\text{Varians (Selisih) Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar anggaran dapat diserap dan mengetahui seberapa besar penghematan. Adapun kriteria pengukuran analisis varians (selisih) belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Kriteria Analisis Varian Belanja

Kriteria Varians Belanja	Kategori Varians Belanja	Ukuran
Baik	Selisih disukai	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
Kurang Baik	Selisih tidak disukai	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber : (Mahmudi, 2019)

2.5.2 Rasio Efisiensi Belanja

(Mahmudi, 2007), menyatakan bahwa efisiensi adalah analisis yang berguna untuk mengetahui perkembangan belanja. Pada dasarnya, analisis ini terkait dengan gagasan produktivitas. Jika sebuah instansi tidak mencapai tingkat efisiensi yang rendah, maka bisa dikatakan adanya pemborosan dalam

menggunakan dana anggaran untuk belanja. Efisiensi belanja diukur untuk mengetahui seberapa rendah tingkat penghematan anggaran yang digunakan untuk kegiatan dan program belanja daerah yang dialokasikan dan berhubungan langsung dengan pelaksanaannya tanpa mengurangi kualitas yang diberikan. Jika tingkat persentase yang diperoleh dari pengukuran efisiensi terbilang rendah, maka anggaran belanja berjalan dengan efisien, dan sebaliknya jika tingkat persentase yang diperoleh dari pengukuran efisiensi terbilang tinggi, maka adanya pemborosan dalam menggunakan dana anggaran belanja (Nadia & Vina, 2022).

Rasio ini menunjukkan bagaimana anggaran digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik (Halim, 2017). Rasio efisiensi belanja digunakan untuk menganalisis seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan. Rumus perhitungan analisis:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria Tingkat Efisiensi Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1996. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efisiensi yang dibagi menjadi 5 kriteria:

Tabel 2. 2
Kriteria Tingkat Efisiensi

>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kemendagri Tahun 1996

Standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian di bawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Dengan berpedoman pada standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria.